

ANALISIS EFEKTIFITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA SEBAGAI INSTRUMEN PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

EFFECTIVITY ANALYSIS COLLECTIVE BUSINESS GROUP (CBG) AS AN INSTRUMENT IN MANAGEMENT PROGRAM OF THE POOR

Anwar Sitepu

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang, Jakarta Timur

E-mail: sitepu.anwar@yahoo.co.id

Abstract

This study was aimed to discover: 1) The existence and the effectiveness of CBG as an instrument in management program of the Poor and 2) The factors determining the success or the failure of CBG. This study was conducted by using secondary data, namely: the papers published in scientific journals, books, and theses to achieve Bachelor, Master or Doctoral Degrees. The data were taken from internet by google search engine. Its result found 15 scientific papers consisting of 7 journals, 7 books, 4 essays, theses and dissertations. The data were also taken from CBG evaluation reports conducted by the author in Katingan regency in May 2015. Based on those data, it was found out that the CBG existence was not long-lasting, its business was not growing well. CBG was not effective enough in the management program of the Poor. The factors resulting CBG to be less effective were as follows: a) CBG was formed in impromptu; b. The lack of socialization before the implementation of CBG activities; c) Top-down tendency; d) misdirection e) Its business type did not fit local resources; f) Its business type did not fit local culture/habit; g) Its business management was unsuitable; h) Its work division was considered to be unfair; i) Livestock breeds were too young; j) Its companions were not reliable; k) Its supervision was not optimal. Those ten factors were interrelated to one and another. In conclusion, principally, the management of program implementation, started from planning, organizing, directing and controlling, was still weak.

Keywords: CBG, the poor.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) eksistensi dan efektifitas KUBE sebagai instrumen penanganan fakir miskin dan 2) faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan KUBE. Studi dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu karya tulis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku, dan tugas mahasiswa untuk memperoleh gelar S1, S2 atau S3. Data dicari di internet dengan menggunakan mesin pencari google. Hasil pencarian ditemukan sebanyak 15 karya tulis ilmiah, yang terdiri dari KTI dalam jurnal sebanyak 7 buah, KTI dalam bentuk buku (7 buah) dan dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi (4 buah). Selain itu data berasal dari laporan hasil evaluasi KUBE yang dilakukan penulis di Kabupaten Katingan pada bulan Mei 2015. Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa eksistensi KUBE di lapangan tidak bertahan lama, usaha yang dibangun tidak berkembang. KUBE kurang atau tidak cukup efektif sebagai instrumen penanganan fakir miskin. Faktor yang membuat KUBE kurang efektif adalah: (a) pembentukan KUBE bersifat dadakan; (b) minim sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan; (c) cenderung top down; (d) salah sasaran; (e) jenis usaha kurang sesuai dengan sumberdaya lokal; (f) jenis usaha kurang sesuai dengan kebiasaan (budaya) masyarakat; (g) manajemen usaha (dagang) kurang tepat; (h) pembagian kerja tidak dirasa tidak adil; (i) bibit (ternak) terlalu kecil; (j) pendamping kurang handal; (k) pengawasan belum optimal. Kesepuluh faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Secara keseluruhan intinya adalah manajemen pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian masih lemah.

Kata Kunci: KUBE, fakir miskin.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, kemiskinan merupakan kendala utama dalam peningkatan kesejahteraan bangsa. Oleh karena kemiskinan, hak warga atas kehidupan yang layak belum dapat diwujudkan. Bagi sebagian warga, kemiskinan menjadi rintangan dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia. Jumlah penduduk miskin Indonesia hingga saat ini relative masih cukup tinggi, 28.51 juta orang (11.13%) dari total penduduk pada tahun 2015.

Masalah kemiskinan bersifat kompleks, menyangkut banyak dimensi (*multi dimensional*) kehidupan, mulai dari dimensi sosial, kemanusiaan, hak, keadilan, ekonomi, hingga dimensi hukum, keamanan dan politik. Di Indonesia naik dan turunnya jumlah penduduk miskin juga dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Hal ini kiranya merupakan sesuatu yang wajar karena terkait langsung dengan tujuan hidup bernegara, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah bertekad mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah saat ini menetapkan target menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10,96% (September Tahun 2014) hingga menjadi sekitar 7 sampai 8 persen pada akhir pembangunan jangka menengah tahap III, pada tahun 2019 (Buku I (RPJMN 2015-2019). Pemerintah menyelenggarakan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan.

Ada sejumlah Kementerian/Lembaga yang memiliki program yang difokuskan secara langsung atau tidak langsung pada penurunan jumlah penduduk miskin. Kementerian Sosial

sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang difokuskan membantu atau menangani penduduk miskin, biasanya disebut fakir miskin.

Pada pemerintahan sekarang, 2015 - 2019, Kementerian Sosial (Kemos) diharapkan memberi kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Menteri Sosial telah menandatangani kontrak kinerja dengan Presiden RI, dimana Kemos akan berkontribusi sebesar satu persen dalam mengurangi penduduk miskin. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial telah menetapkan sasaran strategis Kemos, yaitu; berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar satu persen dari target nasional pada tahun 2019, melalui: Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar; Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas (Menteri Sosial, 2016). Kegiatan Kemos untuk penanganan kemiskinan dibungkus dalam nomenklatur Program Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin. Secara konseptual posisinya mengalami pergerakan dari bantuan, rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial.

Saat ini, Penanganan Fakir Miskin di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lainnya yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 78 ayat (1) dinyatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perhatian serius atas penanganan kemiskinan diberikan oleh pemerintah antara lain dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut antara lain diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sering disebut TNP2K. Dengan dibentuknya TNP2K diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan/ menjadi semakin terpadu. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden RI.

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK sekarang, telah diterbitkan Perpres Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada intinya pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial dimaksud meliputi: 1) Program Simpanan keluarga Sejahtera (dengan Kartu Keluarga Sejahtera); 2) Program Indonesia Sehat (Kartu Indonesia Sehat); dan 3) Program Indonesia Pintar (dengan Kartu Indonesia Pintar).

Bagi Kementerian Sosial, penugasan menurunkan penduduk miskin sebesar satu persen seperti disebut di atas adalah sebuah kepercayaan. Perlu dicatat bahwa pada priode sebelumnya peran Kemsos bahkan kurang diperhitungkan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid Kemsos bahkan dibubarkan. Pada masa pemerintahan SBY, Program Kemsos tidak masuk dalam main stream program penanganan penduduk miskin. Oleh sebab itu, kepercayaan pada priode ini wajib dijaga dengan cara bekerja keras.

Pertanyaan pertama yang segera muncul adalah apakah Kemsos memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan tersebut. Secara organisasional Kemsos telah membentuk unit kerja khusus setingkat eselon satu untuk penanganan FM, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan FM (Ditjen PFM). Ditjen ini meliputi tiga direktorat, yang fokus pada wilayah spesifik, yaitu: 1) Direktorat Penganan FM Perkotaan; 2) Direktorat Penganan FM Perdesaan; dan 3) Direktorat Penganan FM Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (Permensos Nomor 20/2015). Dengan terbentuknya Ditjen PFM, maka Kemsos memiliki unit organisasi khusus yang fokus bekerja untuk penanganan FM. Dan dengan demikian diharapkan kinerja Kemsos secara keseluruhan dalam penanggulangan kemiskinan semakin optimal.

Sementara itu, program utama Kementerian Sosial yang difokuskan secara langsung pada penurunan jumlah penduduk miskin adalah Program Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (P2FM). P2FM meliputi lima kegiatan (Ditjen Dayasos, 2010), yaitu: 1) Pemberdayaan FM melalui KUBE. Program ini dilakukan melalui dana dekonsentrasi yang diinisiasi oleh instansi sosial provinsi; 2) P2FM – BLPS merupakan upaya pengembangan KUBE. Program ini dilaksanakan melalui transfer dana langsung ke rekening KUBE sehingga mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan sendiri; 3) Penguatan lembaga pembiayaan KUBE sebagai upaya pembinaan berkesinambungan dalam pemberdayaan FM; 4) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan sarana prasarana lingkungan adalah untuk menciptakan rumah yang layak huni; 5) Pendampingan.

Mencermati implementasi, P2FM sampai sejauh ini tampak mengandalkan tiga kekuatan intervensi. Pertama, teknik pengorganisasian

penerima manfaat Program atau pendekatan kelompok, yang diwujudkan dalam bentuk kelompok usaha bersama (populer disingkat KUBE). Pendekatan kelompok dengan nomenklatur KUBE sudah digunakan sejak tahun 1984 (Joyakin, 2006) atau sejak 1983 (Haryati, 2013). Setiap KUBE beranggotakan sebanyak 10 orang peserta program. Dalam perkembangannya KUBE digunakan oleh beberapa program lain di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga dikenal KUBE-FM, KUBE-KT, KUBE-KMM, KUBE-LU, dan lainnya. KUBE kini terkesan menjadi ciri khas program-program Kementerian Sosial. Kedua, bantuan Sosial. Bantuan sosial diberikan kepada setiap orang peserta (penerima manfaat) program sebesar Rp.2.000.000, yang berfungsi untuk stimulan penumbuhan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam pelaksanaannya bantuan yang diterima masing-masing peserta program dikumpulkan menjadi modal usaha bersama dalam kelompok (KUBE). Pengambilan keputusan dalam kelompok diselenggarakan secara demokratis, mulai dari pemilihan pengurus, menetapkan aturan main. Bantuan Sosial diberikan kembali kepada KUBE yang telah tumbuh dan dinilai memiliki potensi berkembang lebih lanjut. Bantuan tahap kedua ini disebut juga Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (disingkat BLPS) dengan nilai sebesar Rp.40.000.000. KUBE penerima BLPS kerap disebut juga KUBE-BLPS. Bantuan Sosial juga diberikan untuk tujuan/stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (populer disebut RTLH, dan belakangan ini menjadi rutilahu) dan sarana prasarana lingkungan.

Menurut pentahapannya, P2FM dilakukan melalui dua tahap. Pertama, tahap penumbuhan. Kedua, tahap pengembangan. Tahap penumbuhan dilakukan dengan inisiasi oleh pemerintah daerah Provinsi dengan

dana dari Pemerintah melalui mekanisme dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial. Peran Kemosos adalah mengalokasikan dana, menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan monitoring dan evaluasi. Tahap pengembangan dilakukan melalui apa yang dikenal dengan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Bantuan disampaikan melalui transfer langsung ke rekening KUBE sehingga mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan sendiri.

Persoalan menarik yang hendak dan perlu dibahas adalah efektifitas KUBE sebagai instrumen dalam penanganan Fakir Miskin. Hal tersebut perlu dan mendesak dibahas mengingat begitu pentingnya tugas yang diemban. Kementerian Sosial terlebih dahulu harus yakin bahwa P2FM-KUBE sebagai “senjata” yang diandalkan memang cukup sah, layak diandalkan atau tidak?

Pertanyaandiatasmunculmengingat terdapat informasi yang mengindikasikan kinerja P2FM dengan pola KUBE kurang meyakinkan. Pada tahun 2011, P2FM-KUBE dipersoalkan secara serius oleh Bappenas. Ketika itu, program ini bahkan sempat diancam tidak diberi alokasi dana (Marzuki, 2011). Ancaman tersebut disampaikan karena Penanganan Fakir Miskin dengan atau melalui KUBE dinilai memiliki banyak persoalan mendasar (tidak efektif). Bappenas mengungkapkan bukti berupa hasil spot chek di Kota Malang, Kota Kendari dan Kabupaten Pasuruan. yang menunjukkan bahwa KUBE tidak efektif (Suradi, 2012; Bambang Nugroho, 2013).

Empat tahun setelah itu, pada bulan Mei 2015, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Ditjen Dayasos dan PK) melakukan pengecekan (monitoring dan evaluasi) Program Pemberdayaan dan

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya menunjukkan Program belum cukup atau bahkan tidak efektif. Dari 10 KUBE yang dibangun pada tahun anggaran 2014 di dua desa di Kecamatan Sanaman Mantikel yang menjadi sampel evaluasi ternyata tidak satu KUBE pun yang berhasil (Anwar Sitepu, 2015).

Informasi lain, hasil penelitian Puslitbang Kesos pada tahun 2009 atau dua tahun sebelum Bappenas melontarkan kritik keras (Suradi dan Mujiadi, 2009: 65) yang melakukan evaluasi KUBE-BLPS di lima provinsi (Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Utara dan Jawa Timur) menemukan bahwa tidak ada satu KUBE pun yang masih memiliki asset dari bantuan modal usaha yang diberikan sebelumnya. Suradi dan Mujiyadi menjelaskan bahwa, Pada umumnya asset mereka dari KUBE dari bantuan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dari seluruh sasaran penelitian, 65 persen KUBE tidak memiliki asset lagi. Sebagian lain masih memiliki asset namun sudah tidak dapat dijadikan barang modal karena rusak.

Walaupun tidak dapat digeneralisasi secara nasional, akan tetapi hasil temuan beberapa pihak yang melakukan pengecekan KUBE di wilayah dan waktu berbeda seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Program Penanganan Fakir Miskin yang dilakukan melalui KUBE ternyata belum memperoleh kemajuan signifikan. Seyogianya, setelah Tim Puslitbang Kesos mengungkapkan hasil temuannya pada tahun 2009, pelaksanaan P2FM diperbaiki serius. Dalam kenyataannya, tahun 2011, ketika Bappenas melakukan spotcheck di tiga lokasi, ternyata hasilnya masih sangat mengecewakan, hingga Bappenas pada saat itu memberi peringatan keras. Temuan Dirjen Dayasos dan PK seperti pada kasus KUBE di Kecamatan Sanaman Mantikel, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah pada tahun

2015, menunjukkan bahwa pelaksanaan P2FM melalui KUBE masih amat memperhatikan, usaha ekonomi yang dibangun tidak dapat eksis. Artinya KUBE tidak efektif, usaha ekonomi yang dibangun tidak dapat bertahan. Lebih jauh, hal itu berarti tujuan program meningkatkan penghasilan keluarga FM belum berhasil diwujudkan.

Situasi demikian sangat mencemaskan terlebih karena P2FM-KUBE hingga sejauh ini merupakan satu-satunya “senjata” yang diandalkan Kemsos untuk melaksanakan tugas merealisasikan target penurunan jumlah penduduk miskin. Patut dicatat juga bahwa berdasarkan pengalaman, penurunan jumlah penduduk miskin pada posisi sekitar 10, 11 sampai 12 persen lebih sulit dibanding dari posisi 13 persen atau lebih (Hamonangan, 2009). Pada priode 2009-2014 target penurunan persentase penduduk miskin menjadi 8 sampai 10 persen dari posisi 14,15 persen pada tahun 2009, awal priode. Realisasi pada akhir tahun 2014 persentasi penduduk miskin adalah 11,96 persen (Bappenas, seperti dikutip Haryati, 2011:3). Hal ini berarti diperlukan teknik dan strategi khusus, beda dengan penanganan sebelumnya.

Kajian ini ini bertujuan untuk: (1) mendiskripsikan eksistensi dan efektifitas KUBE secara lebih luas; (2) mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan Program Pemberdayaan FM melalui KUBE. Tulisan ini dipandang amat penting sebagai masukan bagi Ditjen PFM dan Pimpinan Kemsos pada umumnya dalam merumuskan kebijakan penanganan FM selanjutnya.

Mengingat solusi atas permasalahan ini sudah demikian mendesak maka kajian ini dilakukan dengan menganalisis data skunder, berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Data diperoleh dari penelusuran

di internet, dokumen milik Puslitbang dan laporan pelaksanaan tugas penulis dalam rangka evaluasi KUBE tahun 2015. Secara keseluruhan ditemukan sebanyak 20 karya tulis, sebanyak 19 naskah merupakan hasil penelusuran di internet dan 1 naskah dalam bentuk hard copy. Menurut bentuknya, keduapuluh karya tulis tersebut dipublikasikan dalam empat bentuk, yaitu: 1) Artikel dalam jurnal ilmiah sebanyak 7 naskah; 2) Buku hasil penelitian sebanyak 7 buku; 3) Skripsi/tesis/disertasi sebanyak 5 naskah; 4) paparan bahan seminar 1 naskah (best learning).

Menurut relevansinya dengan topik tulisan ini, terdapat sebanyak 15 naskah yang mengandung informasi relevan dan 5 naskah tidak mengandung informasi yang relevan dengan topik tulisan ini. Seluruh naskah diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, mulai 2006 sampai 2015.

Penulis berasal dari perguruan tinggi, praktisi (lembaga swadaya masyarakat) dan birokrat. Dari 14 karya tulis hasil penelitian lapangan dapat diidentifikasi bahwa lokasi tersebar sangat luas di Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Jogjakarta), Sumatera (Sumut, Sumbar, Lampung), Kalimantan (Kalsel, Kaltim), Sulawesi (Sulut). Data dianalisis secara kualitatif, disajikan dalam bentuk narasi.

PEMBAHASAN

Eksistensi dan Efektifitas KUBE

Eksistensi menunjuk kepada keberadaan sesuatu (Kbbi.wb.id, diakses sabtu, 2 April 2016, pukul 08.27 WIB). Eksistensi ditunjukkan oleh wujud fisik dan atau aktifitas yang dapat diamati dengan alat indra. Dalam hal KUBE eksistensi dilihat dari keberadaan atau keberlangsungan aktifitas kelompok sebagai satu kesatuan. Aktifitas KUBE sesuai konsepnya dapat berupa

pertemuan anggota dan pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi. Sementara itu, efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan dapat dicapai (Sedarmayanti, 2001:59). Menunjuk pada taraf pencapaian hasil. Dalam kasus KUBE berarti menunjuk kepada seberapa jauh tujuan KUBE dapat dicapai. Dalam konteks tulisan ini eksistensi dan efektifitas KUBE ditelusuri dari data skunder, yaitu hasil penelitian pihak lain seperti diuraikan di atas.

Berdasarkan penelusuran atas 15 karya tulis yang mengandung informasi relevan, terdapat sebanyak 8 naskah yang mengungkapkan eksistensi KUBE di lapangan. Kedelapan karya tulis itu menegaskan informasi sebelumnya seperti diuraikan di atas, dari Bappenas, Suradi dan Mujiadi (2009), dan Anwar Sitepu (2015) bahwa KUBE tidak cukup efektif, usaha ekonomi yang dibangun tidak berkembang, kelompok (KUBE) tidak dapat bertahan lama, bubar, hingga manfaat KUBE belum terlihat. Berikut ini dikutip informasi terkait dari masing-masing tulisan, diurutkan mulai dari tahun terkini tahun 2013 sampai tahun 2006.

Pertama, Bambang Nugroho (2013) dalam makalahnya berjudul Rekonstruksi Kelompok Usaha Bersama mengemukakan pandangannya bahwa Kelompok terlalu lama mendongkrak anggota KUBE keluar dari kemiskinan. Pada bagian pendahuluan Bambang mengangkat diskusi yang berkembang dalam seminar KUBE yang diselenggarakan Ditjen Dayasos dan Gulkin tahun 2011, dimana dipertanyakan seberapa jauh KUBE-FM mampu menjadi instrument efektif menurunkan angka kepakiran. Apakah KUBE-FM masih dianggap efektif untuk menangani fakir miskin. Terkait hal tersebut Bambang merujuk dua sumber lain dalam catatan kaki yang menunjukkan bahwa KUBE tidak cukup efektif. Pertama, Laporan Evaluasi Program BLPS tahun 2010 yang

memperlihatkan tingkat manfaat KUBE-FM mencapai 60 persen. Kedua, kajian Nugroho pada tahun 2010, yang menunjukkan bahwa daya tahan KUBE tidak lebih dari 6 bulan (footnote hal 35).

Kedua, Ibrahim, dkk. (2012), Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, yang melakukan penelitian terhadap 10 KUBE-BLPS di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang, Jawa Timur mengungkapkan bahwa dari 30 KUBE yang dibentuk pada tahun 2009 sebanyak 20 KUBE lainnya gagal.

Ketiga, Tim Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Haryati

Roebiyantho, dkk. 2011) yang melakukan penelitian Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE pada tahun 2011 di 4 lokasi, yaitu Kota Banda Aceh (NAD), Kota Tomohon (Sulut), Kota Banjarmasin (Kalsel) dan Kabupaten Ngajuk (Jatim). Subjek evaluasi adalah KUBE yang dibentuk tahun 2004 sampai 2008. Haryati mengungkapkan bahwa hampir separuh KUBE sudah bubar, dalam arti sudah tidak memiliki kegiatan lagi. Di Kota Banjarmasin, misalnya, dalam 4 tahun, mulai 2005, sampai 2008 dibangun sebanyak 150 KUBE. Ketika dikunjungi pada tahun 2011 atau tiga sampai enam tahun setelah dibentuk, ternyata sebagian terbesar sudah tidak ada, bubar, lihat tabel.

Tabel 2. Eksistensi KUBE 2005-2008 di Kota Banjarmasin Ketika dicek Tahun 2011

TAHUN	JUMLAH	KONDISI KUBE					
		MAJU		MASIH ADA		GAGAL	
		JLH	%	JLH	%	JLH	%
2005	40	6	15,0	7	17,5	27	67,5
2006	40	1	2,5	8	20,0	31	77,5
2007	30	11	36,3	9	29,7	10	33,3
2008	40	-	-	40	100,0	-	-
	150	18	12,0	64	42,7	68	45,3

Sumber: Haryati, 2011.

Di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, kondisinya tidak jauh berbeda, dari 110 KUBE yang dibentuk pada priode yang sama, ketika

dikunjungi pada tahun 2011, yang dinyatakan gagal sebanyak 52, masih ada 49 dan maju sebanyak 9 KUBE.

Tabel 3. Eksistensi KUBE 2005-2008 di Kota Tomohon Ketika dicek Tahun 2011

TAHUN	JUMLAH	KONDISI KUBE					
		MAJU		MASIH ADA		GAGAL	
		JLH	%	JLH	%	JLH	%
2005	30	1	3,3	9	30,0	20	66,7
2006	30	-	-	9	30,0	21	70,0
2007	26	1	3,8	14	53,8	11	42,4
2008	24	7	29,2	17	70,8	-	-
	110	9		49		52	

Sumber: Haryati, 2011.

Keempat, Endang Iriyanti (2011), mahasiswa program pasca sarjana Sosiologi UGM Yogyakarta, yang melakukan penelitian Studi Evaluasi tentang Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengungkapkan bahwa hasilnya belum dapat dirasakan oleh anggota kube. Endang mengatakan: Tidak terjadi peningkatan pendapatan, bahkan usaha yang dilakukan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Tingkat kesejahteraan anggota belum berubah tapi dengan bantuan modal yang telah diterima terjadi peningkatan aset meskipun sangat minim.

Kelima, Tim peneliti Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pusbang Tansosmas) (Irmayani, dkk, 2009) melakukan evaluasi atas KUBE di 4 provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara), masing-masing 16 KUBE. Kesimpulannya menyatakan bahwa “dalam perjalanannya pengelolaan usaha cenderung menjadi kabur, satu per satu anggotanya ‘mundur’ sehingga pada akhirnya usaha KUBE hanya dikelola oleh salah seorang anggota”.

Keenam, Micra pada tahun 2007 atas permintaan Bappenas melakukan kajian cepat terhadap lima proyek pemberdayaan, yaitu: 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diselenggarakan Kementerian Kelautan & Perikanan; 2) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian; 3) Bantuan Langsung Masyarakat – Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP), diselenggarakan Kementerian Pertanian; 4) Penyediaan Dana Bergulir untuk Kegiatan Pproduktif Skala Usaha Mikro dengan Pola Bagi Hasil/Syariaah dan Konvensiuonal (P3-KUM), oleh Kementerian Koperasi dan UKM; dan 5) Program Pemberdayaan Masyarakat

Miskin melalui KUBE, diselenggarakan Kementerian Sosial. Salah satu yang dilihat adalah aspek keberlanjutan kegiatan di lapangan. Hasilnya, tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui KUBE dikemukakan bahwa Keberlanjutan proyek ini sangat lemah dengan sejumlah alasan.

Ketujuh, Jauh sebelumnya, Joyakin Tampubolon (2006) untuk keperluan menyusun disertasinya melakukan penelitian atas KUBE. Pada akhirnya seperti ditulis dalam disertasinya, Joyakin tiba pada kesimpulan bahwa KUBE yang dijadikan model dalam program pengentasan fakir miskin di Indonesia sejak tahun 1984 ternyata kurang efektif. Dia mengatakan dari 35.378 KUBE yang sudah dibentuk, tidak terlihat hasil yang signifikan.

Kedelapan, Penelitian lain, dilakukan oleh Endang Iriyanti pada tahun 2011 dengan topik Studi Evaluasi tentang KUBE Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Endang mengatakan bahwa, Tidak terjadi peningkatan pendapatan, bahkan usaha yang dilakukan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Tingkat kesejahteraan anggota belum berubah tapi dengan bantuan modal yang telah diterima terjadi peningkatan aset meskipun sangat minim.

Delapan penelitian lapangan yang dilakukan oleh berbagai pihak ini, dari wilayah berbeda, dan dalam waktu berbeda, mulai tahun 2006 (Joyakin), 2007 (Micra), 2010 (Bambang N), 2011 (Haryati), 2012 (Ibrahim), kiranya cukup untuk melengkapi tiga temuan lain yang dikutip sebelumnya Suradi dan Mujiadi (2009), Bappenas (2013), dan Anwar Sitepu (2015). Semua penelitian menghasilkan temuan senada yaitu menunjukkan bahwa eksistensi KUBE di lapangan tidak bertahan

lama. KUBE sebagai perkumpulan tidak aktif, usaha ekonomi yang dirintis tidak berjalan, asset habis. Dengan demikian patut diyakini bahwa penanganan FM melalui KUBE sampai sejauh ini kurang atau tidak cukup efektif. Tujuan program mengentaskan, meningkatkan kesejahteraan FM tidak dapat dicapai dengan optimal. Disadari bahwa penelitian-penelitian di atas bersifat sporadik baik dari durasi waktu maupun tempat, akan tetapi hasilnya senada, KUBE kurang efektif.

Faktor Penyebab Kegagalan KUBE

Pertanyaan berikut yang segera muncul adalah mengapa KUBE kurang efektif? Pertanyaan ini dijawab oleh beberapa penelitian. Mencermati hasil-hasil penelitian dari berbagai pihak seperti diuraikan di atas dapat dipahami bahwa kurang efektifnya KUBE sebagai instrumen penanganan FM terjadi karena implementasi kegiatan di lapangan dilakukan dengan cara yang kurang sungguh-sungguh.

1) Mat Saleh (2013) mahasiswa Program pasca sarjana Universitas Terbuka melakukan penelitian Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Saleh berkesimpulan bahwa pelaksanaan program di lapangan belum sesuai dengan petunjuk teknis. Artinya proses pelaksanaan program belum dilakukan dengan baik. Saleh mengatakan bahwa, Hanya tiga tahapan yang sudah dilakukan dengan baik, yaitu: pembentukan Tim Koordinasi Penanganan FM, Perekrutan Pendamping dan Pencairan Dana. Tahapan lainnya, yaitu: penentuan anggota kelompok, penentuan jenis usaha, sosialisasi dan tahapan pembinaan dan evaluasi, belum sesuai dengan juknis, sebagian peserta tidak sesuai dengan kriteria, bukan keluarga miskin tetapi menerima

bantuan, sebaliknya keluarga miskin tidak menjadi penerima manfaat.

- 2) Mujiadi (2013) yang melakukan penelitian KUBE di Kota Medan dan Kota Semarang pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sesuai dengan panduan. Mujiadi mengatakan bahwa, Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di lapangan belum sepenuhnya mengikuti panduan yang ada. Hal tersebut terjadi sejak tahap pembentukan KUBE, proses operasional, pendampingan hingga tahap pengembangan KUBE.
- 3) Haryati dalam hasil penelitiannya pada tahun 2011 atau dua tahun sebelum temuan Mat Saleh dan Mujiadi mengungkapkan hal senada. Haryati mengatakan bahwa, Seleksi peserta dan pendamping belum tepat; proposal usaha tidak sesuai potensi lokal. Program kurang disosialisasikan. Moneva belum dilakukan dengan baik. Kriteria peserta berbeda.
- 4) Endang Iriyanti (2011) yang melakukan penelitian Studi Evaluasi tentang Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan pemberdayaan KUBE Fakir Miskin melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman belum berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
- 5) Suradi dan Mujiadi (2009) yang melakukan penelitian evaluative atas KUBE-BLPS tahun 2007, 2006 2004 di lima provinsi (Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Utara dan Jawa Timur) menungkapkan sejumlah faktor yang membuat KUBE kurang efektif yaitu: Pendamping tidak memperoleh diklat, dipilih karena kedekatan dg aparat desa; KUBE tidak memenuhi

syarat; jenis usaha tidak sesuai dengan potensi lokal, hanya untuk memudahkan pembinaan; pelaksanaan sosialisasi lebih sekedar memenuhi syarat administrasi; Belum ada kesungguhan daerah dalam melak moneva KUBE BLPS.

- 6) Edi Ariyanto dan Yulia Anas melakukan penelitian evaluatiive atas Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di dua kabupaten di Propinsi Sumatera Barat tahun 2007. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Pasaman Barat program dilaksanakan di Kec. Sasak Ranah Pasisie dan Kec. Sungai Beremas dengan sasaran masyarakat nelayan miskin di wilayah pesisir dengan sebanyak 19 KUBE. Sedangkan Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif di bidang peternakan. Penelitian inii memang dirancang untuk mengetahui proses pembentukan KUBE. Pada ujungnya mereka berkesimpulan bahwa pembentukan KUBE lebih bersifat dadakan, bersifat top down, seleksi peserta program tidak benar. Dalam laporannya, mereka menguraikan Proses Pembentukan KUBE masyarakat miskin dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial lebih bersifat dadakan. Atau dengan kata lain KUBE dibentuk karena adanya program bantuan yang akan diterima (Top-down) dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat untuk membentuk KUBE. Sebanyak 94,4 % anggota KUBE menyatakan bahwa KUBE belum ada sebelum adanya program P2FM melalui BLPS diterima. Proses pembentukan KUBE dimulai dari adanya informasi dari Satker Dinas Sosial untuk segera membentuk KUBE masyarakat miskin kepada Wali Nagari dan Jorong dimana sekitar 89,5 %

anggota KUBE menyatakan bahwa proses pembentukan KUBE hanya membutuhkan waktu 1 hari.

Lebih lanjut Edi dan Yulia mengungkapkan seleksi peserta program tidak dilakukan dengan benar, dia mengatakan, Masyarakat yang menjadi anggota KUBE dibentuk berdasarkan kebijakan dari Wali Nagari dan Jorong setempat, walaupun tanpa adanya sosialisasi dari dinas tentang KUBE, program dan bentuk bantuan apa yang akan diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada cara pengambilan masyarakat miskin sebagai anggota KUBE. Hal ini terlihat dari adanya anggota KUBE yang hanya terdiri dari sanak famili atau kerabat dekat dengan Jorong dan bahkan sebesar 4,1 % ada anggota KUBE tidak saling kenal dan tidak mengetahui bahwa mereka termasuk sebagai anggota KUBE.

Pembentukan KUBE umumnya masih bersifat Top-down dan bukan bottom-up. Terbentuknya KUBE belum melalui proses sosialisasi dari Dinas terkait tetapi umumnya hanya diserahkan sepenuhnya pada Jorong untuk merekrut masyarakat sebagai anggota KUBE dengan tenggang waktu yang sangat sempit (2 hari). Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan KUBE lebih bersifat pemaksaan.

Mencermati hasil delapan penelitian tersebut di atas tampak bahwa persoalan serius dalam program penanganan fakir miskin ini adalah proses pelaksanaan di lapangan. Mat Saleh mengatakan hanya tiga tahapan yang dilakukan dengan baik sementara tahapan lainnya mulai seleksi peserta program hingga tahapan pembinaan dan evaluasi dilakukan namun tidak sesuai dengan Pedoman. Hal yang sama diungkapkan oleh Mujiadi (2013), Haryati (2011), Endang Iriyanti (2011), Suradi dan Mujiadi (2009), Edi Ariyanto dan Yulia Anas (2007). Implikasi dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Pedoman tersebut berakibat pada

kualitas hasil proses, seperti yang diungkapkan dalam semua penelitian, yaitu: peserta program (sebagian) tidak sesuai kriteria atau salah sasaran; pendamping yang kurang handal (tidak mengikuti diklat, misalnya); usaha yang dikembangkan tidak sesuai potensi lokal; atau usaha mismanajemen. Hal demikian ini kiranya dapat dihindari apabila pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan atau monitoring. Persoalannya pihak yang bertanggung jawab rupanya kurang menaruh perhatian atau membiarkan hal tersebut terjadi.

Mencermati proses pelaksanaan program di dua Kabupaten di Sumatera Barat, Edi dan Yulia (2007) bahkan menuduh implementasi program dilakukan secara dadakan. Bagi mereka, program ini bahkan merupakan program top down. Mereka mengungkapkan tidak ada sosialisasi. Seleksi peserta diserahkan sepenuhnya pada Jorong, aparat desa, dengan tenggang waktu yang sangat sempit (2 hari). Perkaranya hal semacam ini berlangsung terus dari tahun ke tahun. Penelitian Mujiadi tahun 2013 dan penelitian Mat Saleh pada tahun yang sama mengungkapkan hal tersebut.

Kondisi yang serupa kiranya masih terjadi hingga sekarang. Hal ini sekurangnya ditemukan pada kasus KUBE di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Anwar Sitepu, 2015). Pada kasus KUBE di Desa Tumbang Kaman, Kabupaten Katingan ini faktor penyebab kegagalan KUBE ditelusuri dari pendapat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu: 1) pendamping KUBE di Kecamatan Sanaman Mantikel; 2) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Prov. Kalteng,; dan 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial (Kasi Dayasos) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemerintah Kabupaten Katingan

Menurut Pendamping KUBE di Kecamatan Sanaman Mantikel, Sipet, KUBE setempat tidak berhasil karena berbagai hal. Pada kasus KUBE yang menyelenggarakan usaha ternak babi tidak berhasil karena: (1) jenis babi yang dipelihara tidak cocok dengan kondisi desa setempat, dan (2) Bibit yang dibeli masih terlalu kecil. Katanya: “babi batam harus dimandikan setiap hari, di sini tidak pernah dimandikan; bibit babi ketika dibeli masih terlalu kecil”. Sedangkan tiga KUBE yang menyelenggarakan usaha perdagangan sembako (KUBE Club Yahoo, KUBE Club Micle, KUBE Club Texas), bubar karena kekeliruan dalam manajemen. Katanya semua sudah bubar, tepar semua. Karena barang diutangin, semua gak bayar. Yang utang mereka juga, anggota dan warga masyarakat setempat. Sementara itu, KUBE Club Pices yang melaksanakan UEP ternak sapi sudah tidak memiliki asset. Menurut Sipet hal tersebut terjadi karena yang mengurus sapi hanya satu orang, yang lain tidak mau mengurus. Lama-lama ngomel, merasa keberatan, kemudian sapi dijual. Uang hasil penjualan dibagi kepada anggota. Tidak dikasih tahu. Pendamping tahu dari orang lain.

Senada dengan pendapat Sipet, menurut analisa Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Prov. Kalteng, Karno, KUBE di Desa Tumbang Kaman tidak berhasil karena usaha ekonomi produktif yang dilakukan tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Menurut dia, Masyarakat setempat tidak terbiasa dengan pekerjaan yang memerlukan ketekunan detail harian. Dia menjelaskan pola kerja masyarakat setempat: “masyarakat setempat terbiasa dengan hasil yang besar, seperti mengambil kayu di hutan atau menambang emas. Sekali bekerja hasilnya banyak. Kemudian, pulang ke desa, istirahat, menghabiskan hasil kerja. Nanti kembali bekerja setelah uang habis (Sitepu, 2015).

Sebagai bukti dia menunjuk KUBE yang dibangun di wilayah pesisir relative lebih berhasil dibanding KUBE di masyarakat pedalaman (hulu). Menurut dia hal tersebut terjadi karena faktor budaya atau kebiasaan bekerja. Menurut Karno, masyarakat pesisir lebih tekun, terbiasa dengan pekerjaan yang memerlukan ketekunan.

Faktor kedua menurut Karno adalah karena pendamping tidak berfungsi optimal. Hal itu terjadi karena pendamping tidak disiapkan dengan benar, mulai dari proses rekrutmen sampai pelatihan. Oleh karena itu Karno merekomendasikan agar pendamping KUBE disiapkan dengan sungguh-sungguh dan diberi honor yang memadai. Katanya Pendamping KUBE agar direkrut dengan benar. Diberi honor yang pantas, hingga dia bisa hidup. Selama ini bimtek tidak dilakukan maksimal. Rekrutmen sering terlambat. Sudah action di lapangan, bimtek baru dilakukan belakangan sementara kegiatan sudah jalan. Saya tahu KUBE sejak 1987, ya KUBE begitu-begitu saja.

Melky, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial (Kasi Dayasos) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemerintah Kabupaten Katingan, memiliki pendapat senada dengan Karno. Menurut dia, masyarakat setempat terlalu dimanja oleh alam, seperti mengambil hasil kayu dan emas. Menurut Melky, mengelola KUBE perlu ketekunan, sedangkan masyarakat setempat tidak sabar. Melky membandingkan masyarakat Kabupaten Katingan bagian hulu, yang terdiri dari etnis Dayak dengan masyarakat Katingan di bagian hilir yang heterogen, terdiri dari aneka etnis pendatang, yang menurut dia lebih gigih bekerja.

Kiranya pendapat ketiga orang yang terlibat dalam pelaksanaan program penanganan FM pada kasus ini senada dengan temuan

penelitian-penelitian (2006-2013) sebelumnya, proses implementasi program di lapangan belum dilakukan dengan benar. Sipet, petugas pendamping KUBE mengatakan jenis babi yang dipelihara tidak cocok dengan kondisi desa setempat dan bibit babi yang dibeli masih terlalu kecil. Apabila proses dilakukan dengan benar maka hal ini tidak akan terjadi. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Prov. Kalteng, Karno, mengatakan bahwa usaha ekonomi produktif yang dilakukan (yaitu ternak babi atau sapi) tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Budaya masyarakat setempat dan potensi sumber daya alam setempat sejak awal mestinya menjadi pertimbangan bagi pelaksana program. Akan tetapi pada kasus ini budaya dan potensi sumberdaya alam kiranya kurang dijadikan pertimbangan. Kemudian, menurut Melky, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial (Kasi Dayasos) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemerintah Kabupaten Katingan, pengelolaan usaha yang dibangun memerlukan ketekunan sedangkan masyarakat setempat tidak sabar, terbiasa dengan pekerjaan yang langsung memberi hasil yang besar. Akibatnya mereka tidak mau mengurus usaha KUBE. Sekali lagi, kondisi demikian mencerminkan proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan benar, penetapan jenis usaha tanpa pertimbangan yang matang.

Menurut pengamatan penulis apa yang dikemukakan Melky dan Karno adalah cukup beralasan. Fakta yang dapat dilihat di lapangan adalah perawatan ternak babi maupun sapi oleh masing-masing KUBE tidak dilakukan dengan baik dan benar. Sapi milik KUBE di Desa Tumbang Labehu misalnya dibiarkan saja di lapangan. Kandang tampak tidak digunakan, sudah ditumbuhi oleh rerumputan. Atap sudah tidak utuh. Artinya, sapi tidak dikandangkan, dibiarkan di lapangan. Kemudian, ternak babi

milik KUBE di Tumbang Kaman, tampak kurang terawat, kurus, kurang pakan. Berdasarkan wawancara dengan ketua KUBE, pakan yang diberikan adalah ampas tahu dan sisa makanan rumah tangga dan batang pisang. Mencermati kondisi fisik babi maupun kandang kiranya babi tidak diberi pakan yang cukup. Pada pihak lain, mengamati alam sekitar, tampak bahwa tidak tersedia pakan alami, misalnya ubi-ubian. Masyarakat setempat tampak tidak memiliki kebun selain tanaman keras. Artinya, pakan ternak yang dipelihara tidak dapat diperoleh secara swadaya dari alam setempat melainkan harus didatangkan dari luar (Sitepu, 2015)..

Informasi dari kasus di atas mengandung banyak makna terkait proses pelaksanaan program di lapangan, bagaimana KUBE dipersiapkan, dibentuk, kemudian didampingi. Bagaimana anggota KUBE direkrut dan diseleksi, dst. Informasi tersebut mencerminkan kualitas proses pelaksanaan program di lapangan dan kualitas pendamping. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pendampingan KUBE tahun 2014 pada kasus di Kab. Katingan belum dilakukan dengan baik. Sekali lagi hal ini menegaskan bahwa proses implementasi program penanganan fakir miskin melalui KUBE dari tahun ke tahun tidak mengalami perbaikan signifikan.

Menelaah informasi yang diperoleh data skunder hasil penelitian baik dari pihak lain maupun hasil evaluasi yang dilakukan penulis dapat diidentifikasi kecenderungan (pola) yang terjadi dalam proses pelaksanaan program, yaitu: (a) pelaksanaan dilakukan secara terburu-buru (dadakan); (b) sosialisasi kurang; (c) *top down*; (d) berorientasi pada target administratif semata. Konsekuensinya adalah hasil yang dicapai berkualitas buruk, terwujud dalam bentuk: (a) salah sasaran; (b) bibit (ternak) terlalu kecil; (c) pendamping kurang handal; (d)

jenis usaha kurang sesuai dengan sumberdaya lokal; (d) usaha tidak sesuai dengan kebiasaan (budaya) masyarakat. Lebih lanjut, secara keseluruhan KUBE tidak dapat bertahan, usaha tidak produktif, asset habis, program tidak mencapai target.

Mengapa kegiatan belum dilakukan dengan baik? Kegiatan sebuah organisasi tidak dilakukan dengan baik sesungguhnya merupakan masalah manajemen. Bagaimana sebuah program/ organisasi dikelola (*di-manage*). Demikian pun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan FM melalui KUBE belum dilakukan dengan baik pada hahekatnya merupakan masalah management. Manajemen adalah menunjuk kepada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Sekedar contoh, kelemahan aspek perencanaan antara lain diindikasikan oleh pengaturan waktu pelaksanaan yang kurang proporsional, misalnya seleksi anggota (penerima manfaat) hanya diberi waktu dua hari (Kasus Sumatera Barat). Indikasi lain, rekrutmen dan pelatihan dan pendidikan pendamping dilakukan belakangan setelah kegiatan di lapangan sudah berlangsung (kasus Kab.Katingan).

PENUTUP

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak cukup efektif sebagai instrument dalam penanganan fakir miskin. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak di wilayah berbeda dalam kurun waktu 2006 sampai 2015 tidak ditemukan bukti kuat bahwa KUBE dapat eksis dan efektif sebagai instrument penanganan fakir miskin. Usaha ekonomi yang dibangun anggotanya dengan menggunakan modal bersama yang berasal dari bantuan pemerintah ternyata tidak berkembang.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kurang efektifnya KUBE. Pada intinya proses pelaksanaan program belum dilakukan dengan

baik, cenderung bersifat administratif. Tahapan pelaksanaan yang sudah diatur dalam Pedoman tidak dilakukan dengan konsekuen.

Akibatnya KUBE yang terbentuk kurang tangguh. Kondisi demikian tidak hanya dialami oleh KUBE penumbuhan yang diprakarsai oleh instansi sosial Propinsi dengan dukungan dana dekonsentrasi. Kondisi seperti ini juga dialami oleh KUBE pengembangan, yaitu KUBE yang diberi bantuan tahap kedua, yang disebut bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS). BLPS yang seyogianya diberikan kepada KUBE yang berkembang ternyata juga diberikan kepada yang tidak memenuhi syarat. Secara keseluruhan persoalan pokok yang terjadi dalam pelaksanaan Program adalah masalah manajemen. Fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian belum dilakukan dengan baik. Tanpa perubahan signifikan dalam manajemen pelaksanaannya program, KUBE tidak dapat diharapkan berfungsi sebagai instrument efektif dalam penanganan fakir miskin. Apabila penanganan fakir miskin tetap hendak dilakukan dengan pola yang sudah ada selama ini, yaitu melalui KUBE maka perlu dilakukan perubahan signifikan.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kiranya perlu melakukan perubahan signifikan pada implementasi Program apabila tetap hendak menggunakan KUBE sebagai instrument utama. Perubahan yang amat diperlukan adalah pada organisasi pelaksanaan, khususnya dalam aspek mekanisme dan personil. Mekanisme yang perlu dibangun adalah yang mampu memelihara disiplin para pihak yang terlibat. Mulai dari persiapan, termasuk seleksi lokasi, seleksi peserta (penerima manfaat) program, seleksi pendamping, pendidikan dan pelatihan pendamping, monitoring dan evaluasi. Pastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan matang. Maksudnya

seluruh tahapan kegiatan dilakukan dengan benar, mulai dari sosialisasi, seleksi peserta program, seleksi dan pelatihan pendamping KUBE, penetapan jenis usaha.

Untuk itu perlu disediakan tenaga pelaksana khusus yang professional pada semua tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Implementasi program di lapangan diposisikan sebagai kegiatan praktek yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara profesional/ ilmiah. Dilakukan dengan benar maksudnya adalah wajib dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, sistematis dan logis. Oleh sebab itu pelaku di tingkat manajemen maupun di lapangan harus memiliki kapasitas professional. Oleh sebab itu sebaiknya kegiatan penanganan FM dilakukan oleh pejabat fungsional tertentu yang dibentuk khusus. Hal demikian urgen mengingat semakin rendah tingkat kemiskinan semakin pelik teknis penanganannya. Karier pejabat fungsional tertentu ditentukan oleh keberhasilan profesionalnya. Mereka berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban profesionalnya dalam forum profesi. Hal demikian memudahkan pengendalian, secara tidak langsung memaksa mereka fokus bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Apriliana, N. I., (2015). *Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Balai Diklat Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY (skripsi)
- Bambang Nugroho, (2013). Rekonstruksi Kelompok Usaha Bersama. *Informasi* Vol.18 No.01 Tahun 2013
- Endang Iriyanti. (2011). *Pemberdayaan KUBE Fakir Miskin Melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS): Studi Evaluasi tentang*

- Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.* (tesis) (<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php>)
- Edi Ariyanto dan Yulia Anas. (2007). *Rekonstruksi Pemodelan Kelompok Usaha Bersama Dalam Program Pengentasan Kemiskinan. Studi Kasus: Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial.* http://repository.unand.ac.id/684/1/Artikel_EDI_ARIYANTO_HIBER.doc (diakses 18 Februari 2016 pukul 13.12)
- H.M.Achmad Subing. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol.3 No.2 April 2013: 160-177. Bandar Lampung: FE UBL.
- Hamonangan. (2009). *Penjelasan lisan dalam acara Seminar Penetapan Kriteria Fakir Miskin di Kementerian Sosial.* Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Ibrahim Imron, dkk. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama: Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 02 No.3 (485-491) <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article>
- Irmayani. (2009). *Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dalam Perspektif Ketahanan Sosial Keluarga: Studi Evaluasi Pemberdayaan Keluarga melalui KUBE di Empat Provinsi.* Jakarta: P3KS Press.
- Kementerian Sosial RI (2010). *Kebijakan dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin.* Jakarta: Direktorat jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Marzuki. (2011). Sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Dalam Acara Pembukaan Pembinaan Pegawai Puslitbang Kesos. Purwakarta: Hotel Grand Wisata, 3 Oktober 2011.
- Menteri Sosial. (2016). Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Terpadu. badiklit Pensos Tahun 2016. Peran Strategis Badiklit Pensos Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Bahan Paparan. Jakarta: Hotel Mercure, 3 Februari 2016.
- Micra. (2007). *Laporan Kajian Cepat Terhadap Government Community Development Operation Microfinance and Microcredit Projects.* Jakarta: Yayasan Micra.
- Mujiadi. (2013). *Studi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUBE.* Jakarta: P3KS Press.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (2014). *Buku I Agenda Pembangunan Nasional.* Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden RI. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden RI. No.166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Roebiyantho, H. dkk. (2011). *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*. Jakarta: P3KS Press.
- Roebiyantho.H. (2013). Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Informasi* Vol.18 No.02 Tahun 2013.(117-131)
- Saleh.H. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara: Studi pada Dinsosnakertrans Kab.Sukamara*. Jakarta: Univ Terbuka. (TAPM)
- Silaban.H. (2013). Assesment of Task Implementation and Coordination of Joint Busines Group (KUBE) Program. *International Journal of Administrative Science & Organization. Bisnis & Birokrasi*. Vol.20 Number 3. September 2013.
- Sus Eko Z dan Harapan LG. (2015). *Proverty Alleviation Programs Lessons from Indonesia*. Jakarta: Ministri of Social Affair of The Republic of Indonesia
- Suradi. (2012). Pendekatan Kelompok sebagai Modalitas dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Informasi* Vol.17 No.02 Tahun 2012. (65-74).
- Suradi dan Mujiadi. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*. Jakarta: P3KS Press
- Tampubolon, J. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok: Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Disertasi.Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40679> (diakses 2 maret 2016 pkl.11.53)
- Wulandari, F.R. (2011). *Peran Pekerja Sosial Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin Di Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Tangerang*. Jakarta: UIN. (skripsi)
- Yasin, H. (2015). Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui KUBE. *Jurnal Adminstrasi Publik Volume 5 Nomor 1 tahun 2015*. Gorontalo: FISIP Univ Gorontalo. <http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain> (diakses 18 Februari 2016 pukul 13.12)